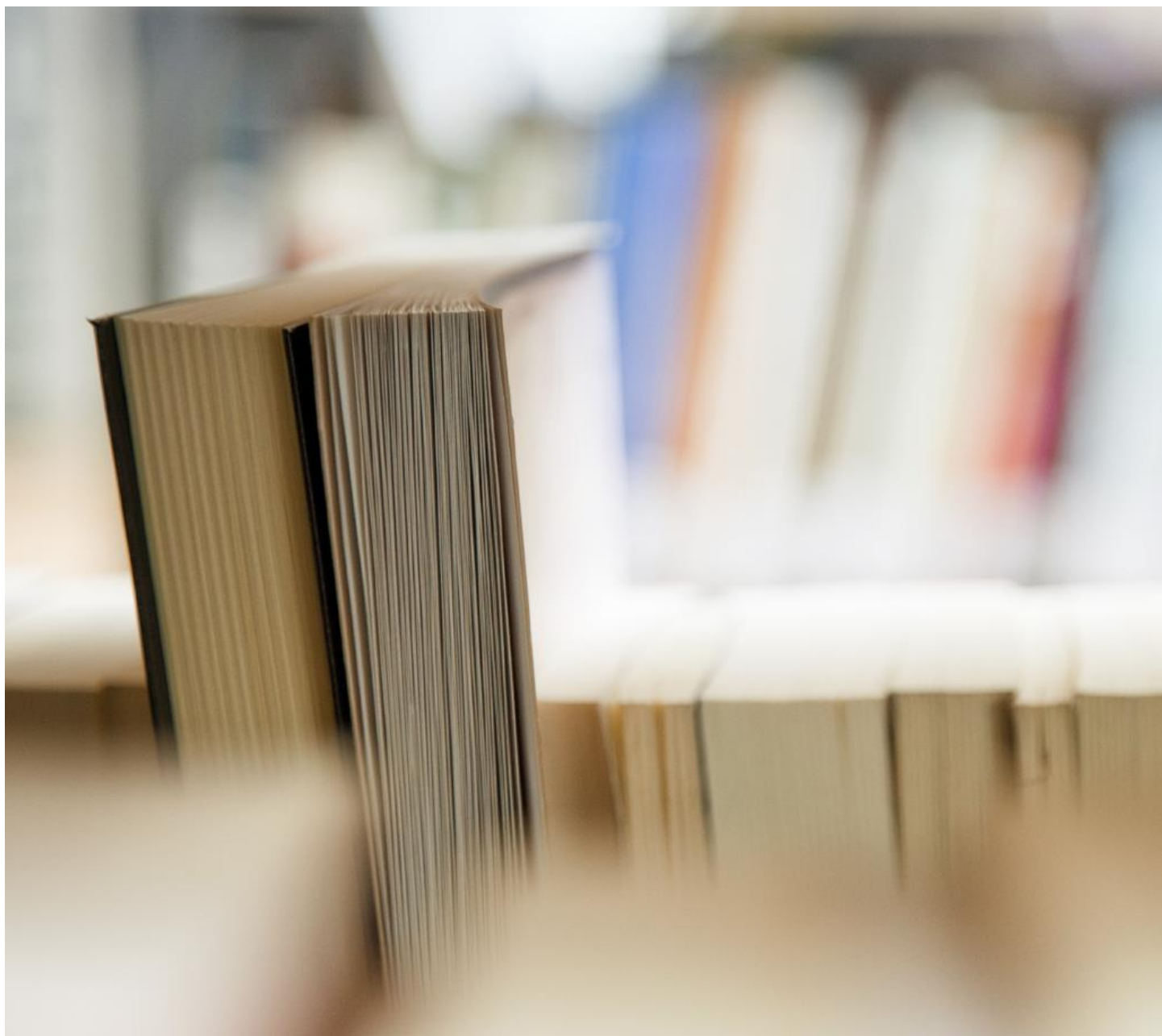




PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



RENCANA KERJA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Rancangan Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024.

Bekasi,

2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BEKASI**



YAYAN YULIANA, S.Sos
NIP. 19690519 199009 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	49
	2.5 Penelaahan Usaha Program dan Kegiatan Masyarakat	72
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	73
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	73
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	76
	3.3 Program dan Kegiatan	77
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	93
BAB V	PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	15
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2024	50
2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bekasi	72
3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target DISKOPUKM Kota Bekasi Tahun 2024	76
3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2025	79
4.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus Menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk Menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) PD, yang merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

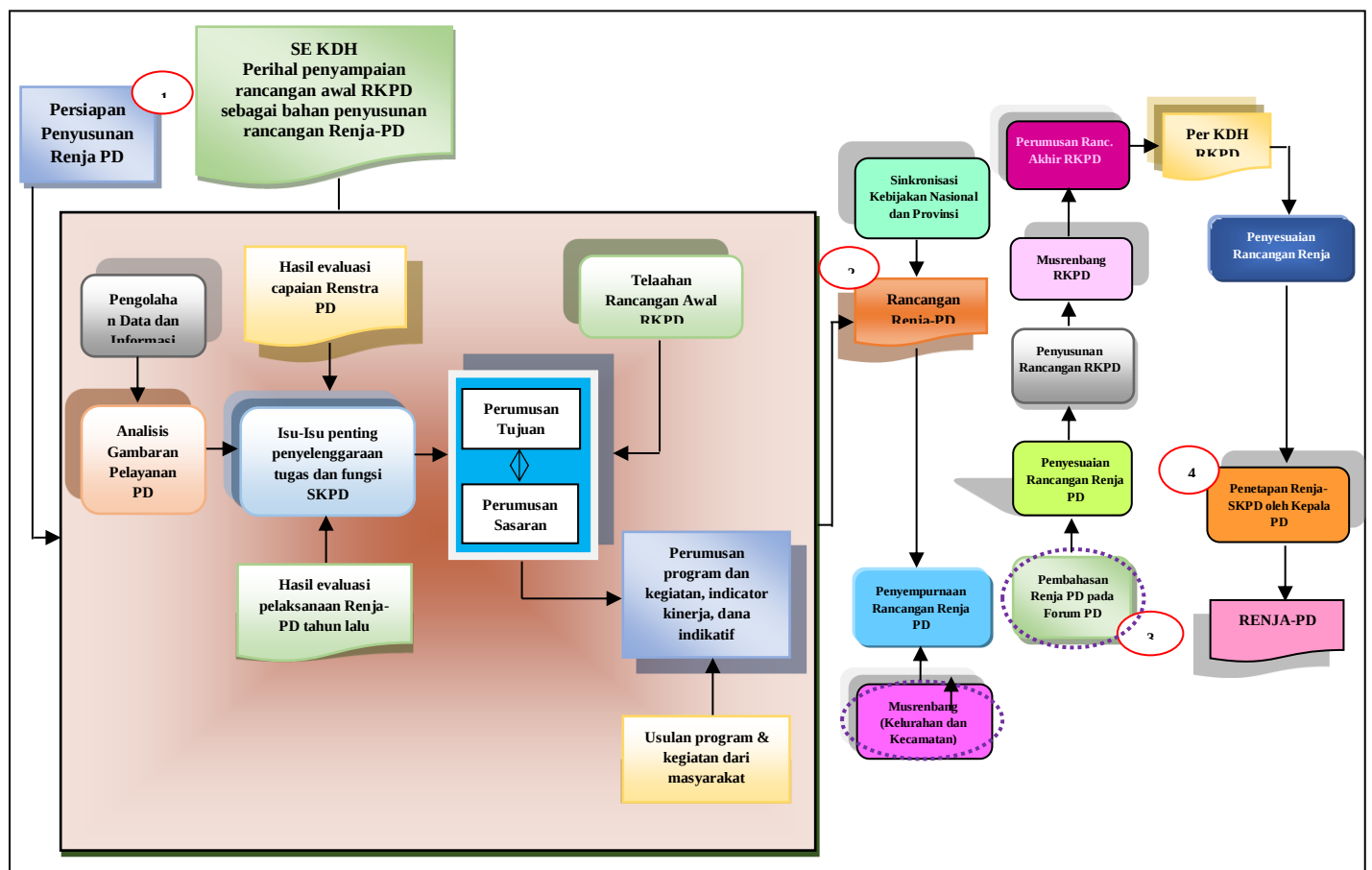
Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjebatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional yang

memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan PD. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah melaksanakan Pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja.

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 dilakukan penelaahan Renstra dan Renja Kementerian/Lembaga terkait dengan kepentingan atau tugas fungsi beberapa Kementerian/Lembaga tingkat pusat dan perangkat daerah yang serupa di lingkungan Pemerintah daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan, antara lain:

1. Maksud

- a. Menterjemahkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam dokumen perencanaan tahunan;
- b. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaksanaan tahun 2024.

2. Tujuan

- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2024;
- b. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
- c. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA DISKOPUKM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISKOPUKM

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan disertai penjelasan apabila ada temuan-temuan perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, abik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kota Bekasi yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Pada bagian ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempedomani Renstra perubahan tahun 2024-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOPUKM

Pada bagian ini berisikan table rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam memperhatikan *visi dan misi* Pemerintah Kota Bekasi, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah Kota Bekasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan misi ketiga yaitu dalam **meningkatkan perekonomian berbasis jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing**. Dengan demikian program prioritas Kota Bekasi menjadi landasan dan acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menata, mengatur, serta mengembangkan sektor Koperasi, UMKM, dan Usaha Informal di tengah-tengah masyarakat dengan menciptakan program seperti :

- a. Menciptakan koperasi besar yang berfungsi sebagai Distribusi Centre;
- b. Menciptakan UMKM yang kreatif dan memiliki daya saing yang tinggi;
- c. Tertatanya kawasan Usaha Informal;
- d. Terciptanya penyerapan tenaga kerja di sektor koperasi dan UMKM;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan koperasi sebagai ekonomi rakyat.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 8 (delapan) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN 2022

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- ✓ Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- ✓ Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

- ✓ Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- ✓ Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- ✓ Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

- ✓ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- ✓ Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Dari 8 (delapan) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki pagu anggaran setelah P-APBD sebesar Rp 14.825.498.726,- (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.862.148.919 ,- (93.50%) realisasi penyerapan anggaran tersebut dipengaruhi oleh hal sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan monitoring penyerapan anggaran, updating dilakukan secara berkala; dan
2. Penyusunan perencanaan kegiatan yang lebih matang.

Adapun realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang tidak memenuhi target kinerja nya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian sebesar 82.20%, dan Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian sebesar 96.52%;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indikator kinerja Presentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam dengan capaian sebesar 4%.

Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang melebihi target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi yang sesuai dengan Peraturan Perkoperasian dari target outcome yang ditetapkan sebesar 100 unit dengan capaian sebesar 102 unit;
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator kinerja Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian dari target outcome yang ditetapkan sebesar 100 orang pengurus dengan capaian sebesar 215 orang pengurus;
3. Program Pemberdayaan UMKM dengan indikator kinerja Persentase PKL yang Menempati tempat yang telah ditetapkan dari target outcome yang ditetapkan sebesar 15% dengan capaian sebesar 15.49%;
4. Program Pengembangan UMKM dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif dari target outcome yang ditetapkan sebesar 5% dengan capaian sebesar 5.1%.

Adapun capaian realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah									
1.01	Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil Menengah									
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100	100	96.52	96.52	100	-	-
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		60.00	100	100	100	100	-	-
		Optimalisasi Disiplin Aparatur		-	100	100	100	100	-	-
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100	82.20	82.20	100	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100	100	100	100	3 Laporan	-	-
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	99.92	3 Laporan	-	-
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat	-	100	100	99.92	99.92	100	-	-
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	0	448 Orang/Bulan 384 Orang/Bulan	92.66	92.66	448 Orang/Bulan 384 Orang/Bulan	-	-

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	0	4 Laporan	92.24	92.24	4 Laporan	-	-
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100	100	13.25	13.25	100	-	-
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	12 Orang	4 Orang	13.25	13.25	0	-	-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100	100	94.40	94.40	100	-	-
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.984 Unit	9.140 Unit	96.13	96.13	8 Paket	-	-
2.17.01.2.06.05			-	3.898 Unit	94 Unit	99.60	99.60	3 Paket	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		68.570 Lembar	57.386 Lembar					
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	7.044 Buku/Eks	7.418 Buku/Eks	99.20	99.20	120 Dokumen	-	-
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0	0	0	0	25 Laporan	-	-
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosnultasi SKPD	-	553 Kali	712 Kali	89.51	89.51	50 Laporan	-	-
2.17.01.2.06.10	Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	21 Box	2 Box	79.27	79.27	1 Dokumen	-	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	100	98.38	98.38	100	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	252 Orang/Bulan	252 Orang/Bulan	98.38	98.38	108 Laporan	-	-
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	100	93.74	93.74	100	-	-
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	14 Unit	16 Unit	91.80	91.80	5 Unit	-	-
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	12 Unit	-	-

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	58 Unit	68 Unit	99.62	99.62	45 Unit	-	-
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	2%	3.27	13.07	4	30.60	8.17	-	-
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapat Izin Simpan Pinjam yang Diterbitkan	-	80 Koperasi	100 Koperasi	75.36	75.36	150 Unit	-	-
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	80 Koperasi	100 Koperasi	75.36	75.36	150 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	10%	-	100	102	102	100	-	-
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	100	96.44	96.44	100	-	-
		Koperasi yang diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian								
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan, Keukuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	100 Unit	96.44	96.44	100 Unit	-	-

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	4%	160	8.17	8.17	100	100	-	-
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya	-	25 Koperasi	20 Koperasi	93.24	93.24	100	-	-
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-	25 Koperasi	50 Koperasi	96.23	96.23	50 Unit Usaha	-	-
					180 Orang					
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	-	-	10 Koperasi	89.38	89.38	10 Unit Usaha	-	-
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	3%	140	100	215	215	100 Orang Pengurus	-	-

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	-	100	100	92.49	92.49	100 Orang Pengurus	-	-
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	70 Koperasi	140 Koperasi	92.49	92.49	150 Orang	-	-
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Skala Usahanya	0.2%	2	2	2	100	2	-	-
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti seluruh Pendidikan Perkoperasian	-	800 Koperasi	2 Koperasi	92.60	92.60	2 Koperasi	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	25 Koperasi Masjid	92.60	92.60	125 Unit Usaha	-	
					1 Lembaga					
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Peresentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	10%	15	15	15.49	103.3	15	-	-
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas Pemberdayaan	-	-	15	92.60	92.60	100	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	-	-	-	-	-	10 Unit Usaha	-	-
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	90 Orang	300 Orang	92.60	92.60	60 Orang	-	-
				3 Lokasi	3 Lokasi					
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	-	-	-	-	279 Orang	-	-
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.1%	0.30	5	5.1	102	5	-	-

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	-	-	100	96.13	96.13	100	-	-
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain Teknologi	-	3 Event	1 Event	96.13	96.13	999 Unit Usaha	-	-
				350 UMKM	100 UMKM					
				350 Orang	50 Produk Bersertifikat					
				20 UMKM	50 UMKM					
				171 UMKM	1 Aplikasi					
					50 UMKM					
					230 Unit Usaha					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian indikator sasaran Perangkat Daerah (PD) dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM.

Realisasi capaian anggaran disetiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektivitas dan efisien penggunaan anggaran. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada penetapan APBD Tahun 2022 dijabarkan dalam 8 program dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.825.498.726	13.862.148.919	93.50
2.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			
3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
4.	Penilaian KSP/USP Koperasi			
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
6.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
7.	Pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Menengah dan Mikro (UMKM)			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
8.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			

Sumber Data: LKIP 2022

Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki program-program baru yang disesuaikan dengan Nomenklatur baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi capaian Kinerja Indikator Peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil pada Tahun 2020 dan 2021 tidak tercapai dengan tingkat capaian Tahun 2020 sebesar 0,2% dari target 2% dan Tahun 2021 sebesar 0,3% dari target 1%. Hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid yang memukul hampir semua sektor kehidupan. Ditambah adanya perubahan regulasi pada kriteria UMKM. Kriteria UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan di dalam aturan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tertuang bahwa Usaha Mikro merupakan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2 miliar, sementara usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar.

Pada Tahun 2020 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelaku UMKM Kreatif mencapai 5% dari target 10% yang ditetapkan. Penyebabnya adalah pandemi Covid-19, di mana masyarakat lebih mengutamakan berbelanja kebutuhan pokok dan menunda belanja kebutuhan lain. Sehingga usaha mikro pun membatasi produksi dan lebih memilih sistem *Pre Order* (PO).

Dari sekian indikator kinerja rasio yang mencapai 100% adalah peningkatan Koperasi aktif, peningkatan jumlah UKM, penyediaan regulasi yang mendukung UKM. Untuk mendukung terwujudnya indikator tersebut ditunjang oleh program pendirian koperasi di lingkungan RW yang akta notarisnya dibiayai oleh Pemerintah Kota Bekasi. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan tujuan sasaran sebagai berikut :



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

[illegible]

[illegible]

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2020 (n-2)	Thn 2021 (n-1)	Thn 2022 (n)	Thn 2023 (n+1)	Thn 2021 (n-2)	Thn 2022 (n-1)	Thn 2023 (n)	Thn 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		√	6.8%	10%	10%	10%	12.08%	13.65%	-	12.08%	
11	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha		√	3.44%	20%	20%	20%	21.21%	25.60%	-	21.21%	

Sumber Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2022

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat

Daerah

A. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi di Tahun 2022 memiliki dua sasaran yaitu Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Akip, target nilai AKIP Diskopukm sebesar 70 dengan realisasi sebesar 75.60 dan capaian kinerja 108%. Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM dengan tiga Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan target sebesar 0.101% dengan realisasi sebesar 0.232% dan capaian kinerja 210%, Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki target sebesar 0.06% dengan realisasi sebesar 0.07% dan capaian kinerja sebesar 116.7%, dan Persentase Peningkatan Kesehatan Koperasi penetapan targetnya sebesar 20%, dengan realisasi sebesar 34% dan capaian kinerjanya sebesar 170%. Melihat capaian kinerja sasaran di tahun 2022 secara keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mencapai lebih dari 100%.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah melakukan upaya-upaya penting diantaranya adalah :

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mendorong koperasi-koperasi untuk melakukan RAT sehingga lebih banyak data yang diperoleh;
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan koperasi melalui pelatihan perkoperasian;
3. Fasilitasi permodalan dengan program dana bergulir dengan bunga yang rendah yaitu 4% pertahun;
4. Fasilitasi ke lembaga perbankan, lembaga non bank (LPDB);
5. Mendorong omset penjualan UMKM misalnya dengan melakukan intermediasi antara UMKM dengan Minimarket, Market Place, dan Toko Modern lainnya.
6. Memberikan suntikan modal usaha bagi UMKM yang kesulitan dalam hal permodalan paska pandemi, selain itu dinas

menghubungkan antara UMKM dengan lembaga-lembaga pembiayaan, seperti perbankan dan pegadaian;

7. Mengadakan program-program yang bisa meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usahanya, misalnya seperti pelatihan-pelatihan manajerial;
8. Mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk salah satunya dengan memfasilitasi sertifikat halal bagi UMKM;
9. Membantu UMKM untuk mempromosikan produknya melalui Videotron yang dipasang di tempat yang ramai;
10. Melakukan sosialisasi penataan PKL di kecamatan melibatkan unsur aparatur dan PKL;
11. Mengidentifikasi kebutuhan PKL-PKL;
12. Melakukan FGD dengan OPD-OPD terkait dalam rangka penataan PKL;
13. Sosialisasi program penguatan kapasitas usaha, jaminan kesejahteraan kerja Bersama pegadaian dan BPJS;
14. Melakukan study banding ke kota yang lebih maju dalam penataan PKL.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melakukan :

1. Memberikan fasilitasi legalitas untuk standarisasi produk UMKM berupa NIB, SKB, PIRT dan Sertifikat Halal;
2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan pada koperasi-koperasi;
3. Mendorong UMKM Go digitalisasi dengan memperhatikan pasar di market place, bekerja sama dengan Gojek, Grab, Shopee dan Tokopedia;
4. Memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga perbankan, Pegadaian dan BPRS Patriot;
5. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan melalui pelatihan, workshop, dan temu bisnis melibatkan akademisi dan praktisi;
6. Meningkatkan konten promosi produk UMKM yang di promosikan melalui Videotron;
7. Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan pendampingan kelembagaan dan usaha bagi para PKL;
8. Melakukan pengembangan aplikasi SUM PKL dan PANGLIMA.

- B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah :
1. Masih rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM;
 2. Rendahnya kemampuan dan sumberdaya UMKM dalam penguasaan teknologi;
 3. Pengembangan sarana promosi UMKM;
 4. Penciptaan iklim usaha yang kondusif;
 5. Belum semua pelaku UMKM mempunyai sertifikasi halal untuk produknya;
 6. Koperasi sangat vital dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Kota Bekasi;
 7. Koperasi sebagai agent of development and change dalam memperkuat perekonomian masyarakat;
 8. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
 9. Kurangnya monitoring dan evaluasi pendataan koperasi dan UMKM.
- C. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Dalam menyusun beberapa dokumen perencanaan perlu memperhatikan isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyusunan Renja juga penting untuk mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sementara regulasi lain yang berlaku bisa menjadi acuan bagi penyusunan Renja misalnya UU atau PP atau Permen atau Perda atau Perwal yang mengatur secara lebih detail sampai dengan teknis perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 juga telah mengarustamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai Gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur untuk

mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai kerangka 17 kaidah pembangunan, yaitu :

1. Membangun Kemandirian

Berupaya memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumberdaya alam, tata Kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain:

- ❖ Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki *skill* dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan;
- ❖ Mampu mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa;
- ❖ Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri;
- ❖ Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia; dan
- ❖ Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

Keadilan adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak

warganegara, bersifat proposional, dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain :

- ✚ Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara;
- ✚ Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan;
- ✚ Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggungjawab;
- ✚ Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan;
- ✚ Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas; dan
- ✚ Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehingga tiap orang paham hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.

3. Menjaga Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain :

- Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi;
- Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara input, proses dan output pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi;

- Mempertimbangkan keberadaan dan pola social budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan *inclusive* dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan;
 - Terpatrynya orientasi sikap (attitude) yang bertanggungjawab sebagai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju;
 - Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan; dan
-
- Bersifat *inclusive* dalam mengdaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara integrative.

Lima fokus kerja Presiden Republik Indonesia pada kurun 2020-2024 ini, yaitu:

1. Pembangunan sumberdaya manusia, dengan prioritas utama:
 - Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil menguasai iptek;
 - Mengundang Kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - Mengoptimalkan Kerjasama dengan industri; dan
 - Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
2. Pembangunan infrastruktur dengan prioritas utama:
 - Menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - Mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:

- Menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
- Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - Penyederhaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
5. Transformasi ekonomi, dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan kepada sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
- Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk bidang perkoperasian, UMKM dan sektor informal diantaranya sebagai berikut:
1. Respon masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun kekuatan ekonomi/modal sendiri masih rendah;
 2. Kualitas pengelola koperasi tentang perkoperasian masih kurang karena *basic*/dasar Pendidikan para pengurus bervariasi;
 3. Belum terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi karena koperasi belum mendapatkan proteksi dalam bentuk jaminan pemerintah (Lembaga penjamin simpanan) seperti Lembaga Keuangan;
 4. Respon pelaku UMKM terhadap kegiatan sangat kurang dikarenakan pelaku UMKM sulit meninggalkan kegiatan bisnis kesehariannya;
 5. Kemampuan Pendidikan pelaku UMKM sangat bervariasi sehingga sulit menyatukan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan atau program;

6. Keterbatasan akses pasar dan modal dikarenakan ukuran aktifitas bisnisnya sangat terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan *networking*;
7. Terbatasnya lahan untuk relokasi PKL;
8. Rendahnya kesadaran hukum PKL;
9. Belum maksimalnya penegakan hukum bagi PKL yang melanggar ataupun kepada oknum yang memanfaatkan PKL.

Dari tantangan dan peluang yang dihadapi tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi perlu mengantisipasinya dengan berbagai program kegiatan seperti melaksanakan sosialisasi perkoperasian secara intens, fasilitasi pendirian koperasi di lingkungan masyarakat (koperasi masjid berbasis syariah yang sudah didukung dengan ditetapkannya SK Wali Kota Bekasi Nomor 518/Kep.448-Ek/XI/2018 tentang Kegiatan Pembentukan Koperasi Masjid Berbasis Syariah di Kota Bekasi), program dana bergulir dari APBD Kota Bekasi, pembentukan konsorsium bisnis koperasi.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang yang menyangkut UMKM dimana pelaku UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya, yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi perlu dilaksanakan fasilitasi pengembangan para pelaku UMKM dalam kapasitas SDM, akses pasar, akses permodalan, aspek kemitraan, aspek teknologi dan aspek legal yang akan mempengaruhi kontribusi terhadap PDRB perekonomian. Sedangkan untuk menangani hambatan dan masalah sektor informal dalam hal ini penanganan PKL perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan tentang penataan dan pemberdayaan PKL, melakukan penertiban dan pendekatan secara persuasive kepada para PKL serta membantu dalam akses permodalan dan peningkatan kemampuan SDM baik dalam penguasaan teknologi dan pengembangan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kota Bekasi adalah melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah, Lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi tahun 2024 adalah: (1) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM), serta Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi tahun 2024 adalah: (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM.

- E. Setelah dianalisis terdapat beberapa rumusan isu-isu strategis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah teridentifikasi, antara lain adalah :
1. Koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat (*agent of development and change*) yang akan memperkuat perekonomian masyarakat sehingga penguatan kelembagaan koperasi perlu dilakukan;
 2. Penataan ruang public untuk PKL dimaksudkan untuk menetapkan lokasi berusaha bagi PKL sehingga PKL bisa meningkatkan kemampuan berusaha dan mempromosikan usaha PKL pada lokasi yang semestinya dan *event Sunday Market* yang dibantu dengan perkuatan modal PKL melalui BPRS Patriot. Hal ini penting dilakukan karena PKL atau sektor informal menyerap tenaga kerja dan mendukung Tema Pembangunan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Daerah;

3. Dalam rangka UMKM berdaya saing diperlukan penguasaan teknologi dan internet yang menjadi penunjang kesuksesan usaha UMKM.

Penguasaan teknologi ini bisa berbentuk produk ataupun aplikasi yang mampu membuat usaha UMKM efisien serta aplikasi berbasis android yang dirancang untuk memasarkan produk UMKM Indonesia secara online dan terintegrasi sistem. UMKM juga didorong untuk mengembangkan kualitas produknya sehingga produk lokal dapat menjadi produk unggulan daerah.

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada tahun 2024-2026 adalah : **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat”**.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2024 bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi bertanggungjawab atas penyelenggaraan prioritas daerah terkait Pelayanan Izin Simpan Pinjam dan Pengembangan UMKM. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sudah terakomodir kebutuhannya, namun terdapat perbedaan besaran pagu anggaran menyesuaikan analisis kebutuhan perangkat daerah dan proyeksi pendapatan daerah.



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Pemerintah Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				RP 9.249.646.988					RP 9.223.646.988	
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 3.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Rp 7.419.410.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Rp 7.423.410.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menenrima Gaji dan Tunjangan ASN	837 Orang/Bulan	Rp 7.413.410.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menenrima Gaji dan Tunjangan ASN	837 Orang/Bulan	Rp 7.413.410.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 489.019.868	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 459.019.868	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 264.019.868	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 264.019.868	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	Rp 25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	Rp 25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	Rp 15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	Rp 15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 160.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 130.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 1.028.217.120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 1.028.217.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.028.217.120	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.028.217.120	
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 310.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 310.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 160.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Rp 100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Rp 100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Rp 50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Rp 50.000.000	
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp 76.355.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp 76.355.000	
			Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	2 %	Rp 76.355.000			Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	2 %	Rp 76.355.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	100 Unit Usaha	Rp 76.355.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	100 Unit Usaha	Rp 76.355.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 Unit Usaha	Rp 76.355.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 Unit Usaha	Rp 76.355.000	Sosialisasi regulasi dan tata cara pembuatan Ijin Simpan Pinjam
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp 40.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp 40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	10 %	Rp 40.000.000			Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	10 %	Rp 40.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	116 Unit Usaha	Rp 40.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	116 Unit Usaha	Rp 40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	116 Unit Usaha	Rp 40.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	116 Unit Usaha	Rp 40.000.000	Monitoring Koperasi dan Pengawasan Koperasi
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp 200.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp 200.000.000	
			Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	4 %	Rp 200.000.000			Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	4 %	Rp 200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	Rp 200.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	Rp 50.000.000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	Rp 50.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	Rp 50.000.000	Penilaian Kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	15 Unit Usaha	Rp 150.000.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	15 Unit Usaha	Rp 150.000.000	Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tokoh Gerakan Koperasi Tingkat Kota Bekasi
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp 300.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp 275.000.000	
			Persentase Pengurus yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	3 %	Rp 300.000.000			Persentase Pengurus yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	3 %	Rp 275.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	720 Orang	Rp 300.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	720 Orang	Rp 275.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	720 Orang	Rp 300.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	720 Orang	Rp 300.000.000	Diklat dan Uji Kompetensi bagi Bendahara (Juru Buku) Sosialisasi Perkoperasian bagi SMA dan SMK di Kota Bekasi
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp 400.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp 343.380.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	0.2 %	Rp 400.000.000			Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	0.2 %	Rp 343.380.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.050 Unit Usaha	Rp 400.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.050 Unit Usaha	Rp 343.380.000	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	1.050 Unit Usaha	Rp 400.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	1.050 Unit Usaha	Rp 343.380.000	Pendirian Koperasi bagi Kelompok Masyarakat Strategis (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Rumah Ibadah, Kelompok Pemuda dan Wanita)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kab/Kota		Kewenangan Kab/Kota			Peringatan HUT Koperasi
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp 505.527.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp 505.527.500	
			Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	10 %	Rp 505.527.500			Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	10 %	Rp 505.527.500	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan	10 %	Rp 505.527.500	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan	10 %	Rp 505.527.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	Rp 105.527.500	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	Rp 105.527.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	75 Orang	Rp 250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	75 Orang	Rp 250.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	Rp 150.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	Rp 150.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp1.100.187.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp 1.100.187.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	0.10 %	Rp 1.100.187.000			Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	0.10 %	Rp 1.100.187.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	0.1 %	Rp 1.100.187.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	0.1 %	Rp 1.100.187.000	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	467 Unit Usaha	Rp 1.100.187.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,	467 Unit Usaha	Rp 1.100.187.000	75 Unit Usaha (PIRT) 150 Unit Usaha (Sertifikasi Halal)



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		SDM, serta Desain dan Teknologi			SDM, serta Desain dan Teknologi		serta Desain dan Teknologi			100 Unit Usaha (Kewirausahaan)
											60 Unit Usaha (Kadaluarsa)
											100 Unit Usaha (Bazar)
TOTAL PAGU					Rp 11.871.716.488	TOTAL PAGU				Rp 11.764.096.488	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2023 disampaikan usulan kegiatan dari hasil pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bekasi untuk tahun 2024 yang ditujukan ke Perangkat Daerah Kota Bekasi. Terdapat 2 (dua) usulan program dan kegiatan yang ditujukan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Pemerintah Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Pengembangan UMKM	Kota Bekasi	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah ditetapkan	1 Paket	Pelatihan Unit Usaha untuk UMKM Binaan
					Pelatihan Kewirausahaan dan UMKM
					Pelatihan Manajemen Berbasis Online bagi Pelaku Usaha
2	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Bekasi	Presentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	20 Unit Usaha	Pelatihan Kopi Keliling bagi Pedagang Kaki Lima

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOPUKM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional (pusat) karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterikatan antar tingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Telaahan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan nasional yaitu terkait arah kebijakan dan/atau tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Disamping itu, perlu ditelaah Renja Kementerian/Lembaga terkait yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja PD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renja K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD. Hasil telaahan terhadap Renja K/L menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis PD yang akan ditangani pada Renja Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Selain dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional, dilakukan juga penelaahan terhadap Visi-Misi, Sasaran dan Program Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024, yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024. Tujuan Pembangunan Kota Bekasi untuk Periode 2024-2026 adalah:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis, inovatif dan akuntabel;
2. Terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan;
3. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman;
5. Terwujudnya ketahanan struktur perekonomian masyarakat kota.

Sedangkan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah;
2. Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah;
3. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi;
4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsive gender;
6. Meningkatnya tenaga kerja yang adaptif dan kesejahteraan masyarakat kota;
7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan;
8. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat;
9. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana;
10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa, dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan investasi;
11. Meningkatnya daya beli masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, Lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Untuk Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendukung pencapaian tema pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 yaitu “*Peningkatan Ekonomi Masyarakat*”, dengan prioritas pembangunan antara lain:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Peningkatan “*Urban Farming*” melalui bantuan hibah kompetitif;
3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Pembentukan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal;
5. “*Link dan Match*” program pemagangan kerja dengan dunia usaha;
6. Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR);
7. Penggunaan “*Saving Land/Land Banking*”
8. Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
9. Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sekolah Inklusif);
10. Subsidi biaya Pendidikan di sekolah swasta untuk siswa kurang mampu;
11. Peningkatan kualitas Pendidikan di Pondok Pesantren.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui startegi dilaksanakan dengan berbagai inovasi dalam program dan kegiatan. Inovasi yang akan dilaksanakan melalui digitalisasi koperasi, *Start Up* Digitalisasi marketing (inkubator UMKM) dan pengembangan aplikasi Simpkl.go.id yang online sehingga dapat diakses oleh operator di kecamatan se-Kota Bekasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024

Berdasarkan telaahan-telaahan tersebut di atas, Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki dua tujuan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM).

Berikut tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM		Nilai AKIP	75.80
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM	Nilai AKIP	75.80
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM)		Persentase Peningkatan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM	0.12 %
		Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1 %
			Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	1 %

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melaksanakan 8 (delapan) Program, yang terdiri dari 12 (dua belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yaitu penyusunan perencanaan pembangunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus memastikan Program Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 akan melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renja), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan melaksanakan Program Kordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan

Usaha Kecil dan Menengah, yang didukung dengan kegiatan-kegiatan koordinasi di berbagai bidang.

Berikut uraian secara rinci program-program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
8. Program Pengembangan UMKM.

Secara rinci berikut ini adalah program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025:



Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKP.1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	8.623.360.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	10.067.808.308
							Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%				100%	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur		100%				100%	
2	17	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Bekasi	3 Laporan	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	3.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	3.000.000
2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	6.823.124.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU		100%	7.987.210.188
2	17	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	784 Orang/Bulan	6.813.124.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU		-	7.981.210.188
2	17	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	6.000.000
2	17	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	-	-	-		100%	20.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	-	-	-		-	20.000.000
2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	459.019.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	619.381.000
2	17	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	8 Paket	264.019.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	300.000.000
2	17	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	24.381.000
2	17	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	25.000.000
2	17	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	20.000.000
2	17	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	-	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	50.000.000
2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	1.028.217.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.028.217.120
2	17	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	1.028.217.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	1.028.217.120
2	17	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Bekasi	100%	310.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	410.000.000
2	17	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	5 Unit	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	220.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	14 Unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	140.000.000
2	17	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	50.000.000
2	17	2			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	Kota Bekasi	2%	76.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2%	100.000.000
2	17	2	201		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	150 Unit Usaha	76.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	100.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	2	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	150 Unit Usaha	76.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sosialisasi Regulasi dan Tata Cara Pembuatan Izin Simpan Pinjam	-	100.000.000
2	17	3			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	10%	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	40.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	3	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	40.000.000
2	17	3	201	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Monitoring Koperasi dan Pengawasan Koperasi	-	40.000.000
2	17	4			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Tersertifikasi Kesehatannya	Kota Bekasi	4%	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4%	70.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	4	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi Wilayah yang Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	70.000.000
2	17	4	201	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penilaian Kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS	-	70.000.000
2	17	5			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Kota Bekasi	3%	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3%	500.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	5	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Peserta dan Pendidikan Pelatihan	Kota Bekasi	150 Orang	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	500.000.000
2	17	5	201	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Bekasi	150 Orang	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Diklat dan Uji Kompetensi bagi Bendahara (Juru Buku) Sosialisasi Perkoperasian Bagi Siswa SMA dan SMK di Kota Bekasi	-	500.000.000
2	17	6			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	Kota Bekasi	0.2%	343.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0.2%	457.999.100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	6	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kota Bekasi	1.050 Unit Usaha	343.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.050 Unit Usaha	457.999.100
2	17	6	201	01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	1.050 Unit Usaha	343.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendirian Koperasi bagi Kelompok Masyarakat Strategis (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Rumah Ibadah, Kelompok Pemuda dan Wanita)	-	457.999.100
2	17	7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang Telah Ditetapkan	Kota Bekasi	10%	905.527.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peringatan HUT Koperasi	10%	710.361.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	7	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi Pemberdayaan	Kota Bekasi	10%	905.527.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	710.361.000
2	17	7	201	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	105.527.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	110.361.000
2	17	7	201	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Bekasi	20 Unit Usaha	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	7	201	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Kota Bekasi	75 Unit Usaha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	300.000.000
2	17	7	201	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	100 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	150.000.000
2	17	8			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	0.1%	1.300.187.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0.1%	1.575.006.200
2	17	8	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	Kota Bekasi	0.1%	1.300.187.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0.1%	1.575.006.200
2	17	8	201	6	Produksi dan Pengolahan,	Jumlah Unit Usaha yang	Kota Bekasi	617 Unit Usaha	1.300.187.000		75 PIRT	-	1.575.006.200



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Desain dan Teknologi	Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Design Teknologi				Pendapatan Asli Daerah (PAD)	150 Sertifikasi Halal		
											100 Kewirausahaan		
											60 Kadaluarsa		
											100 Bazaar		
TOTAL									11.763.810.488				13.521.174.608

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 merancang strategis pembangunan secara komprehensif mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi.

Program prioritas disusun selaras sekaligus untuk mendukung pemenuhan target tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026. Program pembangunan daerah jumlahnya sangat banyak, namun tidak semua program akan menjadi prioritas dalam jangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Program Prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kota Bekasi 2024-2026 sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , diantaranya adalah :

1. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang professional, dinamis, Inovatif dan Akuntabel;
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan;
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman;
5. Terwujudnya ketahanan struktur perekonomian masyarakat kota;

Selain menunjang tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi, beberapa program prioritas juga menunjang terhadap Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan oleh Kepala Daerah, beberapa rumusan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
2. Peningkatan "*Urban Farming*" melalui bantuan hibah kompetitif;
3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Pembentukan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal;
5. "*Link and Match*" program pemagangan kerja dengan dunia usaha;

6. Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR);
7. Pembangunan “*Saving Land/Land Banking*”;
8. Pengentasan Rumah Layak Tidak Huni (Rutilahu);
9. Peningkatan kualitas Pendidikan (Sekolah Inklusif);
10. Subsidi biaya Pendidikan di sekolah Swasta untuk siswa kurang mampu;
11. Peningkatan kualitas Pendidikan di Pondok Pesantren.

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
2. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM berbasis kolaborasi;
4. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
5. Peningkatan Kerjasama dengan DKM Masjid untuk mewujudkan Koperasi berbasis syariah;
6. Peningkatan Database KUMKM.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi dilaksanakan dengan berbagai inovasi dalam program dan kegiatan. Inovasi yang akan dilaksanakan meluli digitalisasi koperasi, *Start Up* Digitalisasi marketing (Inkubator UMKM) dan pengembangan aplikasi [Simpkl.go.id](https://simprkl.go.id) yang online sehingga dapat diakses oleh operator di kecamatan se-Kota Bekasi.

Adapun total pendanaannya untuk program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp 11.763.810.488,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sepuluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan

sumber pendanaan dari APBD Kota Bekasi. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi disertai indicator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2024 berikut pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.



Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BEKASI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024				Keterangan
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKP.1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	9.271.302.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD) / DAU	
							Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%			
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur		100%			
2	17	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Bekasi	100%	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	7.142.442.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU	
2	17	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	702 Orang/Bulan	7.132.442.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU	
2	17	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	590.019.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	8 Paket	350.019.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	1.056.840.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	1.056.840.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Bekasi	100%	472.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	5 Unit	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	14 Unit	152.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	2			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	Kota Bekasi	2%	76.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	2	201		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	150 Unit Usaha	76.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	2	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	150 Unit Usaha	76.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sosialiasi Regulasi dan Tata Cara Pembuatan Izin Simpan Pinjam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	3			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	10%	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	3	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	3	201	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Monitoring Koperasi dan Pengawasan Koperasi
2	17	4			Program Kesehatan Koperasi Penilaian KSP/USP	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	Kota Bekasi	4%	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	4	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	4	201	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penilaian Kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS
2	17	5			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Kota Bekasi	3%	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	5	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	720 Orang	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	5	201	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Bekasi	720 Orang	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Diklat dan Uji Kompetensi bagi Bendahara (Juru Buku)

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	6			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	Kota Bekasi	0.2%	343.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	6	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kota Bekasi	1.050 Unit Usaha	343.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	6	201	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	1.050 Unit Usaha	343.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendirian Koperasi bagi Kelompok Masyarakat Strategis (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Rumah Ibadah, Kelompok Pemuda dan Wanita)
											Peringatan HUT Koperasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang Telah Ditetapkan	Kota Bekasi	10%	905.527.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	7	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan	Kota Bekasi	10%	905.527.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	7	201	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	105.527.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	7	201	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Bekasi	20 Unit Usaha	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	7	201	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Kota Bekasi	75 Unit Usaha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	7	201	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	50 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	8			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	0.1%	1.500.187.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	8	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	Kota Bekasi	0.1%	1.500.187.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	8	201	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Design dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Design Teknologi	Kota Bekasi	617 Unit Usaha	1.500.187.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PIRT, Sertifikasi halal, Kewirausahaan, Kadaluarsa, Bazar, PKJB
TOTAL									12.611.751.484		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dengan mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bidang-bidang dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran dan target renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024.

Berdasarkan hal diatas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan Rencana kerja yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang-bidang;
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berkewajiban untuk melaksanakan Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024;
3. Program-program yang tercantum dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilakasanan dan memberikan hasil yang harapkan, maka setiap komponen diharapkan dapat mengupayakan penguatan peran *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024, baik seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024. Selanjutnya kami menyadari bahwa

Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat kami hargai untuk perbaikan.

Bekasi, Juli 2023

**Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bekasi**



YAYAN YULIANA., S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690519 199009 1 003